



SALINAN

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pembinaan dan pengawasan yang tumpang tindih, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan ditetapkan paling lambat akhir bulan April setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
10. Inspektorat Provinsi adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
12. Peta Pengawasan Tahunan APIP adalah kesepakatan antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota mengenai jadwal pengawasan yang dilakukan di Kabupaten/Kota.

## Pasal 2

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk :

- a. mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

## Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan hasil koordinasi antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

- (2) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Uraian fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini; dan
  - b. Peta Pengawasan Tahunan APIP Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Tahun 2023.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Juni 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Utancatangani secara  
elektronik o.ch

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 17 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI TAHUN 2023

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>JANUARI 2023</b>										
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	Rp83.830.000	2	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Khusus
2.	Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Aspek Pelayanan Publik di Daerah	Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Kabupaten Klaten; b. Kabupaten Sragen; c. Kabupaten Boyolali	RMP RSP RPL HP	9 Januari 2023 20 Januari 2023 10 Februari 2023 10 Hari	Rp105.180.000	6	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meyakini bahwa urusan bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan							
3.	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	9 Januari 2023 27 Januari 2023 3 Maret 2023 15 Hari	Rp73.630.000	-	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dengan standar akuntansi pemerintahan.							
4.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab Demak	RMP RSP RPL HP 9 Januari 2023 20 Januari 2023 10 Februari 2023 10 Hari	6	Rp41.640.000	1	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
5.	Audit Kinerja	Audit Kinerja Program Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi	Menilai efektivitas Program Perlindungan Sosial dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi	a. Dinas Kelautan dan Perikanan; b. Dinas Ketahanan Pangan; c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; d. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; e. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; f. Dinas Perhubungan; dan g. Dinas Sosial.	RMP RSP RPL HP 9 Januari 2023 27 Januari 2023 3 Maret 2023 15 Hari	18	Rp120.400.000	1	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
6.	Reviu	Reviu Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) TW IV Tahun 2022	1. Memberikan hasil analisis atas: a. Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, baik dari sisi yang mendorong permintaan (demand) produk dalam negeri, mendorong penyediaan (supply) produk dalam negeri, dan perluasan kapasitas dan kemudahan pasar (market) produk dalam negeri;	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 5 Hari	6	Rp4.500.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			b. komitmen pengalokasian belanja daerah kepada produk dalam negeri oleh pemerintah daerah; c. realisasi komitmen belanja pemerintah daerah pada produk dalam negeri. 2. Mengidentifikasi permasalahan pengutamaan produk dalam negeri; 3. Memberikan saran-saran perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.								
7.	Pengawasan Lainnya	Monitoring TLHP APIP/TLHP BPK/TLHP Itjen Kemendagri/Pengaduan Masyarakat	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	15	44.400.000	3	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
8.	Pengawasan Lainnya	Monitoring Stranas PK	Memastikan semua data dan atau informasi terkait Strategi Nasional Pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	5	3.700.000	1	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
9.	Pengawasan Lainnya	Asistensi LHKPN	Memverifikasi data pengisian LHKPN untuk memastikan keaslian datanya dan membantu pengisian LHKPN	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	33.300.000	3	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>FEBRUARI 2023</b>										
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/ Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	Rp83.830.000	2	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Khusus
2.	Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Aspek Pelayanan Publik di Daerah  Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Meyakini bahwa urusan bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	a. Kabupaten Purworejo b. Kabupaten Purbalingga c. Kabupaten Banjarnegara	RMP RSP RPL HP	6 Februari 2023 17 Februari 2023 10 Maret 2023 10 Hari	Rp105.180.000	6	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3.	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Februari 2023 24 Februari 2023 14 April 2023 15 Hari	Rp73.630.000	-	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
4.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab Semarang	RMP RSP RPL HP	6 Februari 2023 17 Februari 2023 10 Maret 2023 10 Hari	Rp41.640.000	1	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah



No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Audit Kinerja	Audit Kinerja Program Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi	Menilai efektivitas Program Perlindungan Sosial dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi	a. Dinas Kelautan dan Perikanan; b. Dinas Ketahanan Pangan; c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; d. Dinas Pertanian dan Perkebunan; e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; f. Dinas Perhubungan; g. Dinas Sosial.	RMP RSP RPL HP 6 Februari 2023 24 Februari 2023 14 April 2023 15 Hari	17	Rp114.210.000	1	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
6.	Pengawasan Lainnya	Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Memperoleh <i>update</i> kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yang terklarifikasi (valid), memantau progress realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 5 Hari	6	Rp4.500.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
7.	Pengawasan Lainnya	Monitoring TLHP APIP/TLHP BPK/TLHP Kemendagri/Pengaduan Masyarakat Itjen	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 8 Hari	15	44.400.000	3	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	Pengawasan Lainnya	Asistensi LHKPN	Memverifikasi data pengisian LHKPN untuk memastikan keaslian datanya dan membantu pengisian LHKPN	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	33.300.000	3	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
9.	Pengawasan Lainnya	Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi	Memberikan pengetahuan terkait Pengendalian Gratifikasi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	5	3.700.000	1	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
10.	Pengawasan Lainnya	Pemantauan Saber Pungli	Memberikan pemahaman mengenai gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar	Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	Jadwal mengikuti APH	10	11.100.000	1	Sedang	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
11.	Pengawasan Lainnya	Monev MCP Tematik KPK	Memastikan semua data dan atau informasi terkait koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Terkait di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	Jadwal mengikuti dari KPK	5	-	1	Sedang	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
<b>MARET 2023</b>											
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	Rp83.830.000	2	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Khusus
2.	Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan	Aspek Pelayanan Publik di Daerah	Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Kota Semarang b. Kabupaten Wonogiri c. Kota Pekalongan	RMP RSP RPL HP	6 Maret 2023 17 Maret 2023 18 April 2023 10 Hari	17	Rp105.180.000	6	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Daerah	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meyakini bahwa urusan bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan								
3.	Reviu	Reviu Dokumen Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah	Memberikan keyakinan terbatas bahwa indikator kinerja kunci dalam LPPD telah didukung dengan data-data yang memadai	Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4.	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Maret 2023 27 Maret 2023 9 Mei 2023 15 Hari	10	Rp73.630.000	1	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
5.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab Wonosobo	RMP RSP RPL HP	6 Maret 2023 17 Maret 2023 18 April 2023 10 Hari	6	Rp41.640.000	1	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
6.	Reviu	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian <i>output</i> kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh jenis dan bidang DAK Fisik yang diperoleh pemerintah daerah pada tahun berkenaan	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp12.000.000	3	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Kepatuhan SMA/SMK/SLB Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	1. SMA N 1 Pringsurat, Temanggung; 2. SMK N Jumo, Temanggung; 3. SMA N 1 Warureja, Tegal; 4. SMK N 1 Warureja, Tegal.	RMP RSP RPL HP 6 Maret 2023 17 Maret 2023 18 April 2023 10 Hari	12	Rp82.180.000	4	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
8.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit TIK SPBE	Menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan	Dinas Komunikasi dan Informatika	RMP RSP RPL HP 6 Maret 2023 17 Maret 2023 18 April 2023 10 Hari	6	Rp36.600.000	1	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
9.	Pengawasan Lainnya	Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Memperoleh <i>update</i> kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yang terklarifikasi (valid), memantau progress realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 3 Hari	6	Rp2.700.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
10.	Konsulting	Asistensi Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta berbagi pengalaman tentang P3DN	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 2 Hari	6	Rp1.800.000	1	Rendah	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Pengawasan Lainnya	Monitoring TLHP APIP/TLHP BPK/TLHP Itjen Kemendagri/Pengaduan Masyarakat	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	15	44.400.000	3	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
12.	Pengawasan Lainnya	Desk TLHP Khusus Temuan SMA/SMK/SLB	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Temuan SMA/SMK/SLB	SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	15	16.650.000	3	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
13.	Pengawasan Lainnya	Monitoring Stranas PK	Memastikan semua data dan atau informasi terkait Strategi Nasional Pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	5	3.700.000	1	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
14.	Pengawasan Lainnya	Asistansi LHKASN	Memverifikasi data pengisian LHKASN untuk memastikan keaslian datanya dan membantu pengisian LHKASN	SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	33.300.000	3	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
15.	Pengawasan Lainnya	Sosialisasi MCP	Memberikan pengetahuan terkait MCP	8 SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	5	1.850.000	1	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
16.	Pengawasan Lainnya	Monev MCP Tematik KPK	Memastikan semua data dan atau informasi terkait koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Terkait di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	Jadwal mengikuti dari KPK	5	-	1	Sedang	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
17.	Pengawasan Lainnya	Reviu Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD	Memberikan keyakinan terbatas bahwa RTP OPD telah disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	55.500.000	12	Sedang	Subbagian Perencanaan (Sekretariat)

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>APRIL 2023</b>										
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	Rp83.830.000	2	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Khusus
2.	Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Aspek Pelayanan Publik di Daerah  Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Meyakini bahwa urusan bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	a. Kabupaten Batang; b. Kabupaten Kendal; c. Kota Salatiga.	RMP RSP RPL HP	6 April 2023 20 April 2023 19 Mei 2023 10 Hari	Rp105.180.000	6	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Kab Pati; b. Kab Grobogan; c. Kab Jepara.	RMP RSP RPL HP	3 April 2023 17 April 2023 30 Mei 2023 10 Hari	Rp114.370.000	3	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
4.	Monitoring	Monitoring Transfer Dana Desa	Mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian saat dilaksanakan monitoring tersebut	a. Kab Pati; b. Kab Grobogan; c. Kab Jepara.	RMP RSP RPL HP	18 April 2023 20 April 2023 15 Mei 2023 3 Hari	Rp17.760.000	3	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
5.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Kepatuhan SMA/SMK/SLB Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	1. SMA N 7 Surakarta; 2. SMK N 9 Surakarta; 3. SMA N 4 Surakarta; 4. SMK N 6 Surakarta.	RMP RSP RPL HP	6 April 2023 20 April 2023 19 Mei 2023 10 Hari	Rp82.180.000	4	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit TIK SPBE	Menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan	Dinas Komunikasi dan Informatika	RMP RSP RPL HP 6 April 2023 20 April 2023 19 Mei 2023 10 Hari	6	Rp36.600.000	1	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
7.	Pengawasan Lainnya	Reviu Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) TW I Tahun 2023	<p>1. Memberikan hasil analisis atas:</p> <p>a. Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, baik dari sisi yang mendorong permintaan (demand) produk dalam negeri, mendorong penyediaan (supply) produk dalam negeri, dan perluasan kapasitas dan kemudahan pasar (market) produk dalam negeri;</p> <p>b. komitmen pengalokasian belanja daerah kepada produk dalam negeri oleh pemerintah daerah;</p> <p>c. realisasi komitmen belanja pemerintah daerah pada produk dalam negeri.</p> <p>2. Mengidentifikasi permasalahan pengutamaan produk dalam negeri;</p> <p>3. Memberikan saran-saran perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.</p>	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 5 Hari	6	Rp4.500.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	Pengawasan Lainnya	Monitoring TLHP APIP/TLHP BPK/TLHP Itjen Kemendagri/ Pengaduan Masyarakat	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	15	44.400.000	3	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
9.	Pengawasan Lainnya	Penilaian Zona Integritas	Untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	3	-	1	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
10.	Pengawasan Lainnya	Desk Pemutakhiran Data TLHP	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	15	11.100.000	15	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
11.	Pengawasan Lainnya	Asistensi LHKASN	Memverifikasi data pengisian LHKASN untuk memastikan keaslian datanya dan membantu pengisian LHKASN	SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	33.300.000	3	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
12.	Pengawasan Lainnya	Pemantauan Saber Pungli	Memberikan pemahaman mengenai gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar	Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	Jadwal mengikuti APH	5	1.850.000	1	Sedang	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
13.	Pengawasan Lainnya	Reviu Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD	Memberikan keyakinan terbatas bahwa RTP OPD telah disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	55.500.000	12	Sedang	Subbagian Perencanaan (Sekretariat)
<b>MEI 2023</b>											
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	Rp83.830.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus



No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Aspek Pelayanan Publik di Daerah  Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Meyakini bahwa urusan bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	a. Kabupaten Pati; b. Kabupaten Rembang; c. Kabupaten Blora	RMP RSP RPL HP 8 Mei 2023 22 Mei 2023 12 Juni 2023 10 Hari	17	Rp105.180.000	6	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3.	Reviu	Reviu RKPD	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	RMP RSP RPL HP 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4.	Reviu	Reviu RPJMD	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	RMP RSP RPL HP 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Kab Magelang; b. Kab Brebes; c. Kab Banyumas.	RMP RSP RPL HP 9 Mei 2023 22 Mei 2023 9 Juni 2023 10 Hari	16	Rp114.370.000	3	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
6.	Monitoring	Monitoring Transfer Dana Desa	Mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian saat dilaksanakan monitoring tersebut	a. Kab Magelang. b. Kab Brebes; c. Kab Banyumas.	RMP RSP RPL HP 23 Mei 2023 25 Mei 2023 19 Juni 2023 3 Hari	16	Rp17.760.000	3	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Reviu	Reviu Tata Kelola PBJ	Pemenuhan MCP Korsupgah	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	RMP RSP RPL HP 25 Mei 2023 31 Mei 2023 19 Juni 2023 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
8.	Reviu	Reviu Tata Kelola BMD	Pemenuhan MCP Korsupgah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	RMP RSP RPL HP 25 Mei 2023 31 Mei 2023 19 Juni 2023 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
9.	Reviu	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Pemenuhan MCP Korsupgah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	RMP RSP RPL HP 25 Mei 2023 31 Mei 2023 19 Juni 2023 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
10.	Audit Kinerja	Audit Kinerja BUMD Provinsi	Membantu mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) sehingga dapat memacu peningkatan kinerja secara lebih sehat, mandiri, dan akuntabel	a. PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah; b. PT. Sarana Patra Jateng; c. PT. Citra Mandiri Jateng	RMP RSP RPL HP 8 Mei 2023 29 Mei 2023 5 Juli 2023 15 Hari	17	Rp114.210.000	3	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
11.	Reviu	Reviu Manajemen ASN	Pemenuhan MCP Korsupgah	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 25 Mei 2023 31 Mei 2023 19 Juni 2023 5 Hari	6	Rp4.500.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
12.	Reviu	Reviu SSH, ASB dan HSPK	Memberikan keyakinan terbatas bahwa kewajaran penyusunan SSH, ASB, dan HSPK sesuai dengan harga pasar	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; b. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	RMP RSP RPL HP 25 Mei 2023 31 Mei 2023 19 Juni 2023 5 Hari	6	Rp4.500.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13.	Pengawasan Lainnya	Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Memperoleh <i>update</i> kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yang terklarifikasi (valid), memantau progress realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	6	Rp4.500.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
14.	Pengawasan Lainnya	Monitoring TLHP APIP/TLHP BPK/TLHP Itjen Kemendagri/Pengaduan Masyarakat	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	15	44.400.000	3	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
15.	Reviu	Reviu PMPRB OPD	Memberikan keyakinan terbatas atas hasil penilaian mandiri Tim Assessor tiap bidang Reformasi Birokrasi pada komponen pengungkit	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	15	44.400.000	41	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16.	Evaluasi	Evaluasi RB Provinsi	Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, mampu memberikan pelayanan publik secara prima, serta memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	5	14.800.000	1	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
17.	Pengawasan Lainnya	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai efektivitas APIP yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam Internal Audit Capability Model (IACM)	APIP Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	5	14.800.000	1	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
18.	Pengawasan Lainnya	Penilaian Zona Integritas	Untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	3	-	1	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
19.	Pengawasan Lainnya	Asistensi LHKASN	Memverifikasi data pengisian LHKASN untuk memastikan keaslian datanya dan membantu pengisian LHKASN	SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	33.300.000	3	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20.	Pengawasan Lainnya	Pendampingan Desa Antikorupsi	Mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia yang ada untuk mejadi Desa Antikorupsi	29 Desa di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	33.300.000	3	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
21.	Pengawasan Lainnya	Reviu Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD	Memberikan keyakinan terbatas bahwa RTP OPD telah disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	44.400.000	12	Sedang	Subbagian Perencanaan (Sekretariat)
<b>JUNI 2023</b>											
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/ Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	Rp83.830.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus
2.	Evaluasi	Evaluasi SAKIP SKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Juni 2023 16 Juni 2023 10 Juli 2023 10 Hari	42	Rp142.720.000	41	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3.	Reviu	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan Renja SKPD	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Kab Karanganyar; b. Kab Semarang; c. Kab Klaten.	RMP RSP RPL HP	12 Juni 2023 23 Juni 2023 1 Agustus 2023 10 Hari	16	Rp114.370.000	3	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Monitoring	Monitoring Transfer Dana Desa	Mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian saat dilaksanakan monitoring tersebut	a. Kab Karanganyar; b. Kab Semarang; c. Kab Klaten.	RMP RSP RPL HP 26 Juni 2023 28 Juni 2023 17 Juli 2023 3 Hari	16	Rp17.760.000	3	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
6.	Reviu	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian <i>output</i> kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh jenis dan bidang DAK Fisik yang diperoleh pemerintah daerah pada tahun berkenaan	RMP RSP RPL HP 5 Hari	16	Rp12.000.000	3	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
7.	Pengawasan Lainnya	Desk Pemutakhiran Data TLHP BPK	Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
8.	Reviu	Reviu KUA-PPAS Murni Tahun 2024	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian rancangan KUA-PPAS dengan RKPD	Rancangan KUA PPAS Prov. Jateng/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	RMP RSP RPL HP 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
9.	Audit Kinerja	Audit Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah	Menilai kinerja Prioritas Pembangunan Daerah yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E)	Prioritas Daerah "Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pematapan ketahanan bencana"	RMP RSP RPL HP 5 Juni 2023 16 Juni 2023 10 Juli 2023 10 Hari	17	Rp114.210.000	1	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
10.	Pengawasan Lainnya	Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Memperoleh <i>update</i> kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 3 Hari	6	Rp2.700.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			pemerintah daerah yang terklarifikasi (valid), memantau progress realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah.								
11.	Konsulting	Asistensi Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta berbagi pengalaman tentang P3DN	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	6	Rp1.800.000	1	Rendah	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
12.	Pengawasan Lainnya	Monitoring TLHP APIP/TLHP BPK/TLHP Itjen Kemendagri/Pengaduan Masyarakat	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	15	44.400.000	3	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
13.	Pengawasan Lainnya	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai efektivitas APIP yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam Internal Audit Capability Model (IACM)	APIP Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	8 Hari	15	44.400.000	1	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	Pengawasan Lainnya	Desk Pemutakhiran Data TLHP	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	15	11.100.000	15	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
15.	Pengawasan Lainnya	Monitoring Stranas PK	Memastikan semua data dan atau informasi terkait Strategi Nasional Pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	5	3.700.000	1	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
16.	Pengawasan Lainnya	Asistensi LHKASN	Memverifikasi data pengisian LHKASN untuk memastikan keaslian datanya dan membantu pengisian LHKASN	SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	33.300.000	3	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
17.	Pengawasan Lainnya	Pendampingan Desa Antikorupsi	Mengembangkan kekuatan atau kemampuan ( <i>daya</i> ), potensi, sumber daya manusia yang ada untuk mejadi Desa Antikorupsi	29 Desa di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	33.300.000	3	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
18.	Pengawasan Lainnya	Sosialisasi Antikorupsi dan Integritas	Memberikan pengetahuan nilai dan norma terkait antikorupsi dan integritas	Siswa SMA/SMK dan Mahasiswa di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	Narsum DPRD	5	3.700.000	1	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
19.	Pengawasan Lainnya	Pemantauan Saber Pungli	Memberikan pemahaman mengenai gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar	Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	Jadwal mengikuti APH	10	11.100.000	1	Sedang	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
20.	Pengawasan Lainnya	Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Memberikan keyakinan terbatas ( <i>reviu</i> ) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	44.400.000	12	Sedang	Subbagian Perencanaan (Sekretariat)



No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>JULI 2023</b>											
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/ Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	Rp79.730.000	2	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Khusus
2.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Probity Audit	Meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektivitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	Rp76.400.000	2	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Khusus
3.	Konsulting	Fasilitasi permasalahan pengadaan barang/jasa	Memfasilitasi untuk mencari solusi atas permasalahan pengadaan barang/jasa	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	6	Rp8.740.000	1	Rendah	Urban Bidang Pengawasan Khusus
4.	Evaluasi	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD)	Melakukan Evaluasi terhadap kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	20 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Juli 2023 24 Juli 2023 14 Agustus 2023 10 Hari	42	Rp143.420.000	20	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5.	Reviu	Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan	Pemenuhan MCP Korsupgah	DPMPPTSP	RMP RSP RPL HP	25 Juli 2023 31 Juli 2023 16 Agustus 2023 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6	Pengawasan Lainnya	Pengawasan Perizinan	Pemenuhan MCP Korsupgah	DPMPPTSP	RMP RSP RPL HP	25 Juli 2023 31 Juli 2023 16 Agustus 2023 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Pengawasan Lainnya	Fasilitasi Penyusunan RKPD 2024 Kabupaten/Kota	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKPD	Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 25 Juli 2023 31 Juli 2023 16 Agustus 2023 5 Hari	17	Rp12.750.000	1	Rendah	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Kepatuhan SMA/SMK/SLB Swasta	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	6 SMA/SMK/SLB Swasta Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 10 Juli 2023 24 Juli 2023 9 Agustus 2023 10 Hari	16	Rp114.370.000	6	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
9.	Konsulting	Pendampingan Usaha Mandiri Sekolah	Mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia yang ada Usaha Mandiri Sekolah	SMK Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 2 Hari	5	Rp1.500.000	1	Rendah	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
10.	Reviu	Reviu KUA PPAS Perubahan	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian KUA-PPAS perubahan dengan RKPD	Rancangan KUA PPAS Perubahan Prov. Jateng/Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
11.	Audit Kinerja	Audit Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah	Menilai kinerja Prioritas Pembangunan Daerah yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E)	Prioritas Daerah "Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana"	RMP RSP RPL HP 10 Juli 2023 31 Juli 2023 5 September 2023 15 Hari	17	Rp114.210.000	1	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
12.	Reviu	Reviu Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) TW II Tahun 2023	1. Memberikan hasil analisis atas : a. Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan penggunaan produk	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 5 Hari	6	Rp4.500.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			<p>dalam negeri, baik dari sisi yang mendorong permintaan (demand) produk dalam negeri, mendorong penyediaan (supply) produk dalam negeri, dan perluasan kapasitas dan kemudahan pasar (market) produk dalam negeri;</p> <p>b. komitmen pengalokasian belanja daerah kepada produk dalam negeri oleh pemerintah daerah;</p> <p>c. realisasi komitmen belanja pemerintah daerah pada produk dalam negeri.</p> <p>2. Mengidentifikasi permasalahan pengutamaan produk dalam negeri;</p> <p>3. Memberikan saran-saran perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.</p>									
13.	Pengawasan Lainnya	Monitoring APIP/TLHP BPK/TLHP Kemendagri/ Pengaduan Masyarakat	TLHP Itjen	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	15	44.400.000	3	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	Pengawasan Lainnya	Asistensi LHKASN	Memverifikasi data pengisian LHKASN untuk memastikan keaslian datanya dan membantu pengisian LHKASN	SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	33.300.000	3	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
15.	Pengawasan Lainnya	Monev MCP Semester I	Memastikan semua data dan atau informasi terkait koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terpenuhi	8 SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	5	3.750.000	1	Sedang	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
16.	Pengawasan Lainnya	Pendampingan Desa Antikorupsi	Mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia yang ada untuk mejadi Desa Antikorupsi	29 Desa di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	33.300.000	3	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
17.	Pengawasan Lainnya	Sosialisasi SPI	Memberikan informasi terkait survey penilaian integritas	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	5	3.700.000	1	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
18.	Pengawasan Lainnya	Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Memberikan keyakinan terbatas (reviu) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	44.400.000	12	Sedang	Subbagian Perencanaan (Sekretariat)
AGUSTUS 2023											
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	Rp79.730.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Probity Audit	Meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektivitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	Rp76.400.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus
3.	Konsulting	Fasilitasi permasalahan pengadaan barang/jasa	Memfasilitasi untuk mencari solusi atas permasalahan pengadaan barang/jasa	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	6	Rp8.740.000	1	Rendah	Irban Bidang Pengawasan Khusus
4.	Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Kab/Kota	Memperoleh keyakinan atas capaian RPJMD, yang meliputi: 1. Aspek kesejahteraan masyarakat; 2. Aspek daya saing daerah; dan 3. Aspek pelayanan umum.	a. Kab. Banyumas b. Kab. Kudus c. Kab. Temanggung	RMP RSP RPL HP	7 Agustus 2023 21 Agustus 2023 11 September 2023 10 Hari	17	Rp105.180.000	3	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Kepatuhan SMA/SMK/SLB Swasta	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	6 SMA/SMK/SLB Swasta Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	7 Agustus 2023 21 Agustus 2023 11 September 2023 10 Hari	16	Rp114.370.000	6	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
6.	Reviu	Reviu RKA Perubahan	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKA Perubahan	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
7.	Konsulting	Pendampingan Usaha Mandiri Sekolah	Mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia yang ada Usaha Mandiri Sekolah	SMK Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	5	Rp1.500.000	1	Rendah	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Audit Kinerja	Audit Kinerja Pelayanan Publik BLUD	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. RSJD Soedjarwadi Klaten; 2. RSUD Dr. Moewardi Surakarta; 3. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	RMP RSP RPL HP 7 Agustus 2023 28 Agustus 2023 3 Oktober 2023 15 Hari	17	Rp114.210.000	3	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
9.	Pengawasan Lainnya	Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Memperoleh <i>update</i> kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yang terklarifikasi (valid), memantau progress realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 5 Hari	6	Rp4.500.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
10.	Pengawasan Lainnya	Monitoring TLHP APIP/TLHP BPK/TLHP Itjen Kemendagri/Pengaduan Masyarakat	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 8 Hari	15	44.400.000	3	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
11.	Pengawasan Lainnya	Desk TLHP Khusus Temuan SMA/SMK/SLB	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Temuan SMA/SMK/SLB	SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 2 Hari	15	16.650.000	3	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	Pengawasan Lainnya	Asistensi LHKASN	Memverifikasi data pengisian LHKASN untuk memastikan keaslian datanya dan membantu pengisian LHKASN	SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	33.300.000	3	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
13.	Pengawasan Lainnya	Pemantauan Saber Pungli	Memberikan pemahaman mengenai gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar	Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	Jadwal mengikuti APH	10	11.100.000	1	Sedang	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
<b>SEPTEMBER 2023</b>											
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	Rp79.730.000	2	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Khusus
2.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Probity Audit	Meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektivitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	Rp76.400.000	2	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Khusus
3.	Konsulting	Fasilitasi permasalahan pengadaan barang/jasa	Memfasilitasi untuk mencari solusi atas permasalahan pengadaan barang/jasa	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	6	Rp8.740.000	1	Rendah	Urban Bidang Pengawasan Khusus
4.	Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan	Aspek Pelayanan Publik di Daerah	Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Kabupaten Brebes; b. Kabupaten Pemalang; c. Kota Tegal.	RMP RSP RPL HP	4 September 2023 15 September 2023 9 Oktober 2023 10 Hari	17	Rp105.180.000	6	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Meyakini bahwa urusan bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan							
5.	Reviu	Reviu RKPD 2023 Perubahan Provinsi	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKPD Perubahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	Rp3.750.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Kepatuhan	Untuk menilai dan atau memastikan kepatuhan OPD dalam memenuhi ketentuan prinsip	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah; 3. Dinas Kesehatan.	RMP RSP RPL HP	4 September 2023 15 September 2023 9 Oktober 2023 10 Hari	Rp114.370.000	3	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
7.	Reviu	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian <i>output</i> kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh jenis dan bidang DAK Fisik yang diperoleh pemerintah daerah pada tahun berkenaan	RMP RSP RPL HP	5 Hari	Rp12.000.000	3	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
8.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Kepatuhan	Untuk menilai dan atau memastikan kepatuhan OPD dalam memenuhi ketentuan prinsip	1. Badan Kepegawaian Daerah; 2. Badan Penghubung; 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.	RMP RSP RPL HP	4 September 2023 15 September 2023 9 Oktober 2023 10 Hari	Rp128.470.000	3	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
9.	Pengawasan Lainnya	Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Memperoleh <i>update</i> kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yang	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	3 Hari	Rp2.700.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah



No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			terklarifikasi (valid), memantau progress realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah.								
10.	Konsulting	Asistensi Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta berbagi pengalaman tentang P3DN	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	6	Rp1.800.000	1	Rendah	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
11.	Pengawasan Lainnya	Monitoring TLHP APIP/TLHP BPK/TLHP Itjen Kemendagri/Pengaduan Masyarakat	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	15	44.400.000	3	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
12.	Pengawasan Lainnya	Desk Pemutakhiran Data TLHP	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	15	11.100.000	15	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
13.	Pengawasan Lainnya	Monitoring Stranas PK	Memastikan semua data dan atau informasi terkait Strategi Nasional Pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	5	3.700.000	1	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
14.	Pengawasan Lainnya	Asistensi LHKASN	Memverifikasi data pengisian LHKASN untuk memastikan keaslian datanya dan membantu pengisian LHKASN	SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	33.300.000	3	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Pengawasan Lainnya	Monev MCP Tematik KPK	Memastikan semua data dan atau informasi terkait koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Terkait di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP Jadwal mengikuti dari KPK	5	-	1	Sedang	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
16.	Pengawasan Lainnya	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	44.400.000	12	Sedang	Subbagian Perencanaan (Sekretariat)
<b>OKTOBER 2023</b>										
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	Rp83.830.000	2	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Khusus
2.	Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Aspek Pelayanan Publik di Daerah  Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Meyakini bahwa urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	a. Kabupaten Sukoharjo b. Kabupaten Pekalongan c. Kota Surakarta	RMP RSP RPL HP	9 Oktober 2023 20 Oktober 2023 10 November 2023 10 Hari	Rp105.180.000	6	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3.	Reviu	Reviu Renja Perubahan 2023	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan Renja Perubahan SKPD	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	Rp3.750.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Kepatuhan	Untuk menilai dan atau memastikan kepatuhan OPD dalam memenuhi ketentuan prinsip	1. DP3AP2KB; 2. Dinas Sosial; 3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	RMP RSP RPL HP 9 Oktober 2023 20 Oktober 2023 10 November 2023 10 Hari	16	Rp114.370.000	3	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
5.	Reviu	Reviu RKA 2024	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKA 2024	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 5 hari	5	Rp3.750.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
6.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Kepatuhan	Untuk menilai dan atau memastikan kepatuhan OPD dalam memenuhi ketentuan prinsip	1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	RMP RSP RPL HP 9 Oktober 2023 20 Oktober 2023 10 November 2023 10 Hari	17	Rp112.680.000	3	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
7.	Reviu	Reviu Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) TW III Tahun 2023	1. Memberikan hasil analisis atas : a. Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, baik dari sisi yang mendorong permintaan (demand) produk dalam negeri, mendorong penyediaan (supply) produk dalam negeri, dan perluasan kapasitas dan kemudahan pasar (market) produk dalam negeri; b. komitmen pengalokasian belanja	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 5 Hari	6	Rp4.500.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<p>daerah kepada produk dalam negeri oleh pemerintah daerah;</p> <p>c. realisasi komitmen belanja pemerintah daerah pada produk dalam negeri.</p> <p>2. Mengidentifikasi permasalahan pengutamaan produk dalam negeri;</p> <p>3. Memberikan saran-saran perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.</p>								
8.	Monitoring	Monitoring TLHP APIP/TLHP BPK/TLHP Itjen Kemendagri/Pengaduan Masyarakat	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	15	44.400.000	3	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
9.	Pengawasan Lainnya	Asistensi LHKASN	Memverifikasi data pengisian LHKASN untuk memastikan keaslian datanya dan membantu pengisian LHKASN	SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 hari	15	33.300.000	3	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
10.	Pengawasan Lainnya	Monev MCP Triwulan III	Memastikan semua data dan atau informasi terkait koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terpenuhi	8 SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 hari	5	3.700.000	1	Sedang	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
11.	Pengawasan Lainnya	Pemantauan Saber Pungli	Memberikan pemahaman mengenai gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar	Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	Jadwal mengikuti dari APH	10	11.100.000	1	Sedang	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										(Sekretariat)	
12.	Pengawasan Lainnya	Monev MCP Tematik KPK	Memastikan semua data dan atau informasi terkait koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	Jadwal mengikuti dari KPK	5	-	1	Sedang	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
13.	Pengawasan Lainnya	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 hari	12	44.400.000	12	Sedang	Subbagian Perencanaan (Sekretariat)
<b>NOVEMBER 2023</b>											
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	Rp83.830.000	2	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Khusus
2.	Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemda	Pengawasan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah	Memperoleh keyakinan atas capaian RPJMD, yang meliputi: 1. Aspek kesejahteraan masyarakat; 2. Aspek daya saing daerah; dan 3. Aspek pelayanan umum.	a. Kabupaten Karanganyar; b. Kabupaten Tegal; c. Kabupaten Magelang.	RMP RSP RPL HP	6 November 2023 17 November 2023 8 Desember 2023 10 Hari	17	Rp105.180.000	3	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Kepatuhan SMA/SMK/SLB Swasta	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	6 SMA/SMK/SLB Swasta Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 November 2023 17 November 2023 8 Desember 2023 10 Hari	16	Rp114.370.000	6	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.	Reviu	Reviu DAK Fisik	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh jenis dan bidang DAK Fisik yang diperoleh pemerintah daerah pada tahun berkenaan	RMP RSP RPL HP	5 hari	16	Rp12.000.000	3	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
5.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Kepatuhan SMA/SMK/SLB Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	1. SMAN 6 Purworejo; 2. SMKN 1 Purworejo; 3. SMAN 7 Purworejo; 4. SMKN 3 Purworejo; 5. SMAN 2 Purworejo; 6. SMKN 2 Purworejo.	RMP RSP RPL HP	6 November 2023 17 November 2023 8 Desember 2023 10 Hari	17	Rp112.680.000	6	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
6.	Pengawasan Lainnya	Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Memperoleh <i>update</i> kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yang terklarifikasi (valid), memantau progress realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	6	Rp4.500.000	1	Sedang	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
7.	Pengawasan Lainnya	Monitoring TLHP APIP/TLHP BPK/TLHP Itjen Kemendagri/Pengaduan Masyarakat	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	15	44.400.000	3	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	Pengawasan Lainnya	Validasi Wajib Laporan LHKPN	Validasi pemutakhiran data wajib laporan LHKPN 2024	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 hari	15	33.300.000	1	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)
<b>DESEMBER 2023</b>											
1.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	12	Rp83.830.000	2	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Khusus
2.	Pengawasan Umum dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Aspek Pelayanan Publik di Daerah  Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Meyakini bahwa urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	a. Kabupaten Cilacap; b. Kabupaten Kebumen; c. Kota Magelang	RMP RSP RPL HP	4 Desember 2023 15 Desember 2023 8 Januari 2024 10 Hari	17	Rp105.180.000	6	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Kepatuhan SMA/SMK/SLB Swasta	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	6 SMA/SMK/SLB Swasta Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	4 Desember 2023 15 Desember 2023 8 Januari 2024 10 Hari	16	Rp114.370.000	6	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
4.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Kepatuhan SMA/SMK/SLB Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	1. SMAN 1 Gondang, Sragen; 2. SMKN 1 Gondang, Sragen; 3. SMAN 3 Klaten; 4. SMKN 4 Klaten; 5. SMAN 2 Surakarta; 6. SMKN 8 Surakarta;	RMP RSP RPL HP	6 November 2023 17 November 2023 8 Desember 2023 10 Hari	17	Rp112.680.000	6	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.	Pengawasan Lainnya	Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Memperoleh <i>update</i> kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yang terklarifikasi (valid), memantau progress realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	6	Rp4.500.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
6.	Pengawasan Lainnya	Monitoring TLHP APIP/TLHP BPK/TLHP Itjen Kemendagri/Pengaduan Masyarakat	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Hari	15	44.400.000	3	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
7.	Pengawasan Lainnya	Desk Pemutakhiran Data TLHP	Memperoleh <i>update</i> tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	15	11.100.000	15	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
8.	Pengawasan Lainnya	Monitoring Stranas PK	Memastikan semua data dan atau informasi terkait Strategi Nasional Pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 hari	5	3.700.000	1	Sedang	Subbagian Analisis dan Evaluasi (Sekretariat)
9.	Pengawasan Lainnya	Validasi Wajib Laporan LHKPN	Validasi pemutakhiran data wajib laporan LHKPN 2024	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 hari	15	33.300.000	1	Rendah	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)



No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Area Pengawasan	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Pengawasan Lainnya	Pemantauan Saber Pungli	Memberikan pemahaman mengenai gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar	Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP Jadwal mengikuti dari APH	10	11.100.000	1	Sedang	Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Sekretariat)

**CATATAN :**

RMP = Rencana Mulai Pemeriksaan

RSP = Rencana Selesai Pemeriksaan

RPL = Rencana Penyelesaian Laporan

HP = Hari Pemeriksaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 17 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

PETA PENGAWASAN TAHUNAN APIP TAHUN 2023

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2023												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
<b>INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH</b>														
<b>I</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>													<b>A</b> Itjen Kementerian Dalam Negeri
	1. Biro Administrasi Pembangunan Daerah													<b>B</b> Itjen Kementerian ESDM
	2. Biro Kesejahteraan Rakyat													<b>C</b> Itjen Kementerian Perindustrian
	3. Biro Infrastuktur dan Sumber Daya Alam													<b>D</b> Itjen Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	4. Biro Hukum													<b>E</b> Itjen Kementerian Pertanian
	5. Biro Organisasi													<b>F</b> Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
	6. Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama			<b>X24</b>										<b>G</b> Itjen Kementerian Perhubungan
	7. Biro Perekonomian Daerah													<b>H</b> Itjen Kementerian Ketenagakerjaan
	8. Biro Umum													<b>I</b> Itjen Kementerian Kesehatan
	9. Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa					<b>X58</b> <b>X53</b> <b>X54</b>								<b>J</b> Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
													<b>K</b> Itjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
<b>II</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>												<b>L</b> Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika	
	1. Sekretariat DPRD									<b>X64</b>			<b>M</b> Itjen Kementerian Sosial	
													<b>N</b> Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP		JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2023											KETERANGAN		
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV			DES
III	<b>INSPEKTORAT</b>														<b>O</b>	Itjen Kementerian Perdagangan
	1.	Inspektorat													<b>P</b>	Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga
															<b>Q</b>	Inspektorat Kementerian Koperasi dan UMKM
IV	<b>DINAS DAERAH</b>															
	1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										<b>X64</b>			<b>X1</b>	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi
	2.	Dinas Kesehatan									<b>X64</b>				<b>X2</b>	Probity Audit
	3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya													<b>X3</b>	Audit Barang Milik Daerah (BMD)
	4.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang													<b>X4</b>	Evaluasi Benturan Kepentingan
	5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													<b>X5</b>	Audit Optimalisasi Aset
	6.	Satpol PP													<b>X6</b>	Audit Wajib Lapo LHKPN
	7.	Dinas Sosial	<b>X44</b>	<b>X44</b>								<b>X64</b>			<b>X7</b>	Monev Limbagan Kasus Aduan Masyarakat ke Kab/Kota
	8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<b>X44</b>	<b>X44</b>								<b>X64</b>			<b>X8</b>	TP/TGR
	9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Catatan Sipil														
	10.	Dinas Ketahanan Pangan	<b>X44</b>	<b>X44</b>											<b>X9</b>	SPIP
	11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<b>X44</b>	<b>X44</b>											<b>X10</b>	Saber Pungli
	12.	Dinas Kelautan dan Perikanan	<b>X44</b>	<b>X44</b>											<b>X11</b>	LHKPN
	13.	Dinas Perhubungan	<b>X44</b>	<b>X44</b>											<b>X12</b>	LHKASN
	14.	Dinas Komunikasi dan Informatika				<b>X63</b>									<b>X13</b>	Reviu Reformasi Birokrasi
	15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													<b>X14</b>	Korsupgah
	16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							<b>X52</b> <b>X62</b>						<b>X15</b>	Zona Integritas
	17.	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata													<b>X16</b>	Koordinasi Kap APIP
	18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan										<b>X64</b>			<b>X17</b>	Pembangunan Budaya Integritas
	19.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										<b>X64</b>			<b>X18</b>	Stranas PK

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP		JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2023											KETERANGAN			
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV		DES		
	20.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	X44	X44													
	21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan															X19 Pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah
	22.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral															X20 Evaluasi SAKIP SKPD
	23.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	X44	X44													X21 Evaluasi SAKIP Kab/Kota
																	X22 EKPPD Kab/Kota
		<b>BADAN DAERAH</b>															X23 Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Kab/Kota
	1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						X25 X27 X53 X54	X42			X43	X33				X24 Reviu Dokumen LPPD dan atau LKjIP Provinsi
	2.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah						X60					X64				X25 Reviu RPJMD
	3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						X59									X26 Reviu Renstra
	4.	Badan Kepegawaian Daerah						X61					X64				X27 Reviu RKPD
	5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah											X64				X28 Reviu Renja
	6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											X64				X29 Audit Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
	7.	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah															X30 Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah
																	X31 Fasilitasi RKPD
		<b>BADAN PENGHUBUNG</b>															X32 Evaluasi SPM
	1.	Badan Penghubung											X64				X33 Reviu RKPD Perubahan
		<b>RUMAH SAKIT</b>															X34 Reviu RKA
	1.	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo											X48				X35 Reviu RKA Perubahan
	2.	RSUD Dr. Moewardi											X48				X36 Reviu DAK Fisik
	3.	RSUD dr. Adhyatma															X37 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	4.	RSUD dr. Rehatta															X38 Audit Bantuan Keuangan ke Kab/Kota
	5.	RSJD Dr. Amino Gondohutomo															X39 Audit Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa
	6.	RSJD Dr. RM. Soedjawardi											X48				X40 Audit Belanja Hibah

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP		JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2023												KETERANGAN		
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES			
	7.	RSJD Dr. Arif Zainudin														<b>X41</b>	Audit Bantuan Sosial
																<b>X42</b>	Reviu KUA PPAS
		<b>BADAN USAHA MILIK DAERAH</b>														<b>X43</b>	Reviu KUA PPAS Perubahan
	1.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah															
	2.	PT Citra Mandiri Jawa Tengah						<b>X45</b>								<b>X44</b>	Audit Kinerja SKPD Provinsi
	3.	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah						<b>X45</b>								<b>X45</b>	Audit Kinerja BUMD Provinsi
	4.	PT Perusahaan Daerah Air Bersih														<b>X46</b>	Audit Pengelolaan Keuangan RSUD (Audit Kinerja BLUD)
	5.	PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan														<b>X47</b>	Audit Kinerja SMA/SMK/SLB Negeri
<b>VIII</b>	6.	PT Sarana Patra Hulu Cepu						<b>X45</b>								<b>X48</b>	Audit Pelayanan Publik UPTD Provinsi/RSUD
	7.	PT Asuransi Bangun Askrida														<b>X49</b>	Audit Forensik Sistem UKPBJ
	8.	PT Jamkrida Jateng														<b>X50</b>	Audit Kepatuhan UKPBJ (Reviu Kinerja UKPBJ)
	9.	Kawasan Industri Wijaya Kusuma														<b>X51</b>	Audit Pengelolaan SDM (Audit Kepegawaian)
	10.	PT BPR BKK														<b>X52</b>	Audit Proses Perizinan dan Non-Perizinan (Reviu Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan)
																<b>X53</b>	Reviu SSH
		<b>KABUPATEN / KOTA</b>														<b>X54</b>	Reviu ASB dan HSPK
	1.	Kab. Banjarnegara		<b>X19 X30</b>												<b>X55</b>	Audit Gender
	2.	Kab. Banyumas						<b>X39 X57</b>			<b>X29</b>						
	3.	Kab. Batang					<b>X19 X30</b>									<b>X56</b>	Audit Optimalisasi Aset
	4.	Kab. Blora					<b>X19 X30</b>										
	5.	Kab. Boyolali	<b>X19 X30</b>													<b>X57</b>	Monitoring Transfer Dana Desa
	6.	Kab. Brebes						<b>X39 X57</b>				<b>X19 X30</b>					
	7.	Kab. Cilacap													<b>X19 X30</b>	<b>X58</b>	Reviu TatA Kelola PBJ

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP		JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2023											KETERANGAN				
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV		DES			
8.	Kab. Demak															<b>X59</b>	Reviu Tata Kelola BMD	
9.	Kab. Grobogan				<b>X39</b> <b>X57</b>												<b>X60</b>	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah
10.	Kab. Jepara				<b>X39</b> <b>X57</b>												<b>X61</b>	Reviu Manajemen ASN
11.	Kab. Karanganyar						<b>X39</b> <b>X57</b>						<b>X29</b>				<b>X62</b>	Pengawasan Perizinan
12.	Kab. Kebumen														<b>X19</b> <b>X30</b>		<b>X63</b>	Audit TIK SPBE
13.	Kab. Kendal				<b>X19</b> <b>X30</b>												<b>X64</b>	Audit Dengan Tujuan Tertentu
14.	Kab. Klaten	<b>X19</b> <b>X30</b>					<b>X39</b> <b>X57</b>											
15.	Kab. Kudus								<b>X29</b>									
16.	Kab. Magelang						<b>X39</b> <b>X57</b>						<b>X29</b>					
17.	Kab. Pati				<b>X39</b> <b>X57</b>		<b>X19</b> <b>X30</b>											
18.	Kab. Pekalongan												<b>X19</b> <b>X30</b>					
19.	Kab. Pemasang										<b>X19</b> <b>X30</b>							
20.	Kab. Purbalangga		<b>X19</b> <b>X30</b>															
21.	Kab. Purworejo		<b>X19</b> <b>X30</b>															
22.	Kab. Rembang						<b>X19</b> <b>X30</b>											
23.	Kab. Semarang		<b>X38</b>				<b>X39</b> <b>X57</b>											
24.	Kab. Sragen	<b>X19</b> <b>X30</b>																
25.	Kab. Sukoharjo												<b>X19</b> <b>X30</b>					
26.	Kab. Tegal													<b>X29</b>				
27.	Kab. Temanggung								<b>X29</b>									
28.	Kab. Wonogiri			<b>X19</b> <b>X30</b>														
29.	Kab. Wonosobo			<b>X38</b>														
30.	Kota Magelang															<b>X19</b>		

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2023												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
													X30	
31.	Kota Pekalongan			X19 X30										
32.	Kota Salatiga				X19 X30									
33.	Kota Semarang			X19 X30										
34.	Kota Surakarta										X19 X30			
35.	Kota Tegal									X19 X30				
X	<b>INSTANSI VERTIKAL</b>													
	1. KPU Provinsi Jawa Tengah													
	2. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah													
	3. KONI Jawa Tengah													

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003